

Pengamanan Surat Suara Tanggung Jawab Bersama

JAKARTA, KOMPAS — Pencetakan surat suara Pemilihan Umum 2019 secara resmi dimulai pada Minggu (20/1/2019). Keamanan selama proses di percetakan, penyimpanan, hingga distribusi menjadi tanggung jawab bersama pihak-pihak yang terlibat langsung dalam setiap rangkaianannya.

Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Fritz Edward Siregar, di sela-sela kunjungan ke PT Gramedia, Jakarta, Minggu, mengatakan, pihaknya akan mengawasi proses pencetakan dan penyimpanan surat suara. Bawaslu juga akan mengawasi proses distribusi surat suara.

"(Surat suara) bagian tanggung jawab bersama. Bawaslu dalam hal ini mengawasi proses pencetakan, termasuk penyimpanan. (Bawaslu) bersama KPU akan mengawasi apakah jumlah (surat suara) sesuai, secara kualitas, dan sesuai kontrak," kata Fritz.

Dalam kunjungan tersebut, hadir pula anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU), Ilham Saputra; anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Alfitra Salam; anggota staf operasi Mabes Polri, Ajun Komisararis Besar Gusti Maychandra Lesmana; dan Direktur Politeknik Negeri Media Kreatif (Polimedia) Jakarta Purnomo Ananto.

Bawaslu, ujar Fritz, juga akan mengawasi secara ketat jumlah surat suara yang dicetak dan tidak melebihi jumlah yang ditetapkan. "Jika lebih, akan dimusnahkan di pabrik," kata Fritz.

Menurut Gusti, polisi akan mengamankan lokasi percetakan selama 24 jam. Pencetakan yang dalam hal ini diberlakukan sebagai obyek vital akan terus dijaga selama masa pencetakan. Setelah itu, alur pengamanan dalam proses selanjutnya di sisi distribusi akan didasarkan pada ketetapan KPU.

Sementara itu, Purnomo mengemukakan, pihaknya bertugas memastikan kualitas surat suara sesuai dengan spe-



KOMPAS/RADITYA HELABUMI

Komisi Pemilihan Umum mulai melakukan pencetakan perdana surat suara untuk Pemilu 2019 di enam perusahaan percetakan, salah satunya PT Gramedia Jakarta, Minggu (20/1/2019). Total jumlah surat suara yang akan dicetak PT Gramedia adalah 292.019.984 surat suara untuk Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Jawa Barat, dan Sulawesi Selatan. Proses pencetakan dan distribusi surat suara akan dilakukan dalam rentang waktu 60 hari.

sifikasi yang telah disepakati dalam kontrak. Salah satu unsur yang juga penting dalam surat suara adalah tanda khusus sebagai pengaman untuk menentukan asli atau tidaknya surat suara.

Menurut Ilham, total surat suara yang akan diproduksi sejumlah 939.879.651 lembar. Ini dilakukan lima konsorsium dan satu perseroan terbatas. Mereka adalah konsorsium PT Aksara Grafika Pratama (4 lokasi), PT Balai Pustaka (4 lokasi), dan PT Gramedia (9 lokasi) yang semuanya berkedudukan di Ja-

karta. Adapun di Jawa Timur terdapat konsorsium PT Temprina Media Grafika (11 lokasi) dan PT Puri Panca Pujibangun (6 lokasi). Sementara di Sulawesi Selatan terdapat PT Adi Perkasa Makassar (1 lokasi).

Proses produksi, sesuai jadwal tender, berlangsung 19 Januari-19 Maret 2019. Adapun proses distribusi dan serah terima dilakukan pada 1-29 Maret 2019.

Alfitra berharap KPU dan Bawaslu bekerja sesuai dengan aturan, prosedur, dan ketentuan yang ada. Hal ini penting

untuk menghindari terjadinya sejumlah potensi pelanggaran.

DKPP, tambah Alfitra, juga berharap tidak ada lagi hoaks mengenai pencetakan surat suara sebagaimana ramai beberapa waktu lalu. Pasalnya, pencetakan surat suara secara resmi baru dimulai sesuai jadwal yang ditetapkan.

Selain itu, Alfitra juga mengharapkan masyarakat melapor ke DKPP jika menemukan pelanggaran. "Lapor kalau ada pelanggaran pencetakan, distribusi, dan penyimpanan (surat suara)," ujarnya. (INK)